IMPLIKASI GOLPUT BAGI LEGITIMASI POLITIK KEPALA DAERAH PADA PILKADA KOTA BATAM TAHUN 2024

Putri Rahmadani

NPP. 33.0340

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: puputrahmadani181103@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Astika Ummy Athahirah, S.STP
Email: astika@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *Voter abstention (golput) in the 2024 Batam Mayoral Election reached its highest point in a decade, with turnout of only 46.76% against an abstention rate of 53.24%, raising concern over the political legitimacy of the elected regional head.* ***Purpose:*** *This study analyses the factors causing high abstention in the Batam Pilkada, its implications for the political legitimacy of the elected regional head, and local government efforts to address it.* ***Method:*** *This study employs a descriptive qualitative approach using in-depth interviews with 25 informants, an open questionnaire, and documentation, with data analysed using NVivo 12 and Abas's political legitimacy theory.* ***Result:*** *Findings reveal that abstention is driven by low public trust in government and political elites, weak candidate appeal, the busy schedules of an industrial workforce, high population mobility, adverse weather, and limited political education; these conditions weaken legitimacy across the ideological, performance, participatory, and trust dimensions, despite government efforts such as socialisation, community outreach, media campaigns, and targeted approaches to first-time voters.* ***Conclusion:*** *High abstention in the 2024 Batam Pilkada significantly weakens the political legitimacy of the elected regional head even though the result remains legally valid, so continuous and innovative strategies are needed to strengthen political trust and participation.*

Keywords: *Abstention; Political Legitimacy; Regional Head Election; Political Participation; Public Trust*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Angka golongan putih (golput) pada Pilkada Kota Batam Tahun 2024 mencapai titik tertinggi dalam satu dekade, dengan partisipasi pemilih hanya 46,76% dan golput mencapai 53,24%, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap legitimasi politik kepala daerah terpilih. **Tujuan:** Penelitian ini menganalisis faktor-faktor penyebab tingginya angka golput pada Pilkada Kota Batam, implikasinya terhadap legitimasi politik kepala daerah terpilih, serta upaya pemerintah daerah dalam mengatasinya. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam terhadap 25 informan, kuesioner terbuka, dan dokumentasi, serta analisis data menggunakan NVivo 12 dan teori legitimasi politik. **Hasil/Temuan:** Tingginya angka golput dipengaruhi oleh rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dan elit politik, minimnya ketertarikan terhadap kandidat, kesibukan kerja masyarakat industri, tingginya mobilitas penduduk, faktor cuaca, serta kurangnya pendidikan dan kesadaran politik; kondisi ini melemahkan legitimasi pada dimensi ideologis, kinerja, partisipatif, dan kepercayaan, meskipun pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi, pembinaan komunitas, kampanye media, dan pendekatan kepada pemilih pemula. **Kesimpulan:** Tingginya angka golput pada Pilkada Kota Batam Tahun 2024 melemahkan legitimasi politik kepala daerah terpilih meskipun hasil pemilihan tetap sah secara hukum, sehingga diperlukan strategi yang berkelanjutan dan inovatif untuk memperkuat kepercayaan dan partisipasi politik masyarakat.

Kata Kunci: Golput; Kepercayaan Publik; Legitimasi Politik; Partisipasi Politik; Pemilihan Kepala Daerah.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pilar demokrasi terbesar di dunia melalui penyelenggaraan pemilihan umum yang periodik sebagai wujud kedaulatan rakyat. Dalam sistem ini, partisipasi pemilih bukan sekadar angka statistik, melainkan indikator vital yang mengukur kesehatan demokrasi dan kualitas keterlibatan warga dalam menentukan arah kebijakan publik (Sari, 2023). Partisipasi yang tinggi mencerminkan adanya kesadaran politik dan kepercayaan masyarakat yang kuat terhadap sistem yang berlaku (Labolo, 2007). Namun, idealisme demokrasi ini sering kali berbenturan dengan

realitas di lapangan, khususnya dengan munculnya fenomena Golongan Putih (Golput) sebuah istilah bagi warga negara yang memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya.

Kota Batam menghadirkan studi kasus yang sangat unik dalam dinamika politik lokal di Indonesia. Sebagai kota industri dengan mobilitas penduduk yang sangat tinggi dan masyarakat yang heterogen, Batam memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang kompleks. Kota ini juga memiliki struktur pemerintahan yang unik karena adanya dualisme otoritas antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam, yang secara tidak langsung memengaruhi persepsi politik masyarakatnya.

Data menunjukkan bahwa partisipasi politik di Batam bersifat fluktuatif selama satu dekade terakhir. Pada Pilpres 2014, angka golput tercatat sebesar 46,06%, kemudian sempat menurun menjadi 27,76% pada Pemilu Serentak 2019 karena tingginya antusiasme terhadap pemilihan nasional. Namun, tren ini berbalik pada pemilihan tingkat daerah. Pada Pilkada 2020, golput merangkak naik ke angka 35,77%. Puncaknya terjadi pada Pilkada Kota Batam tahun 2024, di mana angka golput mencapai 53,24% angka tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir. Fenomena ini menjadi alarm bagi kualitas demokrasi lokal karena ketika mayoritas pemilih tidak berpartisipasi, hal tersebut secara serius mengancam legitimasi politik dan dukungan sosial bagi kepala daerah terpilih

Tabel 1.

Tren Golput Kota Batam 2014-2024

Tahun	Jenis Pemilihan	Partisipasi Pemilih	Golput
2014	Pemilihan Presiden	53,94%	46,06%
2014	Pemilihan Legislatif	62,93%	37,07%
2019	Pemilihan Serentak	72,24%	27,76%
2020	Pemilihan Kepala Daerah	64,23%	35,77%
2024	Pemilihan Kepala Daerah	46,76%	53,24%

Sumber: diolah oleh peneliti (2026)

Data perkembangan partisipasi politik masyarakat di Kota Batam selama kurun waktu 2014 hingga 2024 memperlihatkan dinamika yang sangat fluktuatif. Pada periode awal, yakni Pemilu 2014, tingkat partisipasi pemilih di Batam tergolong rendah dengan

angka golput mencapai 46,06% pada pemilihan presiden dan 37,07% pada pemilihan legislatif. Kondisi ini sempat menunjukkan tren positif pada Pemilu Serentak 2019, di mana antusiasme warga meningkat sehingga angka golput berhasil ditekan hingga ke titik terendah, yaitu 27,76%. Namun, pencapaian tersebut tidak bertahan lama; pada Pilkada 2020, partisipasi kembali merosot yang salah satunya dipicu oleh situasi pandemi COVID-19, sehingga angka golput merangkak naik menjadi 35,77%. Puncaknya terjadi pada Pilkada 2024, di mana angka golput melonjak drastis hingga menyentuh 53,24%, sebuah rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir. Fenomena ini mencatatkan realitas bahwa partisipasi politik di tingkat daerah justru cenderung lebih rendah dibandingkan pemilihan nasional, yang pada akhirnya memberikan catatan kritis bagi kualitas demokrasi lokal (Edward, 2021).

Tingginya angka golput ini membawa dampak serius bagi stabilitas sistem politik karena berpotensi melemahkan legitimasi pemerintah daerah yang terpilih. Ketika mayoritas pemilih tidak menggunakan hak suaranya, hal tersebut mencerminkan adanya krisis kepercayaan publik terhadap elit politik serta keraguan akan kemampuan pemimpin dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat yang beragam. Secara teoretis, keabsahan dan kewibawaan seorang kepala daerah sangat bergantung pada besarnya dukungan sosial yang diperoleh melalui pemungutan suara (Silverius et al., 2024). Partisipasi yang tinggi memberikan mandat kuat bagi pemimpin untuk menjalankan tugasnya, sedangkan partisipasi yang rendah seperti yang terjadi di Batam dapat memperlemah kedudukan kepala daerah, memicu perselisihan politik, dan mengganggu efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah (Nasir, 2026).

Kondisi ini menjadi semakin kompleks mengingat karakteristik Kota Batam sebagai pusat industri besar dengan masyarakat yang sangat heterogen dan memiliki mobilitas penduduk yang tinggi. Sebagai kawasan perdagangan bebas, Batam juga menghadapi tantangan unik berupa dualisme otoritas antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam, yang turut memengaruhi persepsi dan preferensi politik warganya. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam Pilkada 2024 di tengah dinamika sosial-ekonomi yang dinamis ini bukan sekadar masalah teknis pemilu, melainkan ancaman nyata bagi keberlangsungan demokrasi di tingkat lokal. Tanpa adanya dukungan mayoritas yang nyata, kepala daerah terpilih akan menghadapi tantangan besar dalam membangun kepercayaan publik dan memastikan stabilitas pemerintahan di masa mendatang. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai implikasi golput terhadap legitimasi politik di Kota Batam menjadi sangat krusial untuk dilakukan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Melalui analisis literatur menggunakan bantuan perangkat VOSviewer, ditemukan bahwa tema mengenai "perilaku memilih" (*voting behavior*) telah dibahas secara luas dalam berbagai penelitian politik. Namun, terdapat kesenjangan penelitian (gap) yang nyata di mana topik mengenai perilaku tidak memilih atau golput jarang dikaitkan secara spesifik dengan implikasinya terhadap legitimasi politik kepala daerah. Kebanyakan penelitian sebelumnya hanya berhenti pada analisis faktor penyebab golput tanpa menelisik lebih jauh bagaimana dampaknya terhadap kewibawaan dan keberlangsungan pemerintahan daerah pasca pemilihan.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian ini memiliki urgensi yang mendesak karena rendahnya partisipasi (di bawah 50%) mencerminkan adanya krisis kepercayaan publik terhadap elit politik dan proses demokrasi di Kota Batam, Angka golput yang dominan dapat menyebabkan kepala daerah terpilih tidak memiliki basis dukungan mayoritas, yang pada gilirannya dapat memicu ketidakstabilan politik dan menghambat efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah. Memahami fenomena ini menjadi kunci untuk memperbaiki strategi pendidikan politik dan memperkuat fondasi legitimasi pemerintahan di masa depan.

1.4 Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, dilakukan telaah terhadap beberapa karya ilmiah terdahulu yang memiliki relevansi dengan fenomena Golongan Putih (Golput) dan partisipasi politik. Penelitian pertama yang menjadi acuan adalah studi yang dilakukan oleh (Fadel Al Rizki et al., 2025) mengenai penyebab golput pada Pilkada DKI Jakarta 2024. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa angka golput di Jakarta dipicu oleh rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme politik, ketidakpuasan terhadap kandidat yang ada, maraknya praktik politik uang, serta kendala aksesibilitas menuju TPS. Perbedaan mendasar dengan penelitian ini terletak pada lokus dan kedalaman analisisnya; jika penelitian sebelumnya berfokus di ibu kota, penelitian ini mengambil konteks Kota Batam yang memiliki karakteristik masyarakat industri dan mobilitas penduduk yang berbeda, serta memberikan dimensi baru dengan mengaitkan fenomena tersebut langsung terhadap legitimasi kepala daerah.

Selanjutnya, Pratiwi (2024) melakukan analisis terhadap fenomena golput pada Pilkada 2024 secara nasional menggunakan pendekatan teori apatisme politik dan pilihan rasional *(rational choice*). Temuannya menunjukkan bahwa meningkatnya angka golput disebabkan oleh kalkulasi rasional pemilih yang merasa partisipasi mereka tidak

memberikan keuntungan signifikan. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam penggunaan teori pilihan rasional, namun perbedaannya terletak pada fokus kajian yang lebih spesifik pada dampak sosiologis dan politik terhadap keabsahan kekuasaan di tingkat lokal, khususnya di wilayah perdagangan bebas seperti Batam.

Penelitian ketiga oleh Mustaqim dan Rambang Basari (2024) meneliti motif masyarakat Kabupaten Bogor pada Pemilu Legislatif 2024 melalui perspektif interaksionisme simbolik. Mereka menemukan adanya berbagai motif ketidakpercayaan masyarakat, mulai dari motif idealis hingga institusional. Meskipun memiliki kesamaan dalam menggali motif pemilih, penelitian ini memperluas analisis dari sekadar pemilihan legislatif ke ranah pemilihan kepala daerah, serta menelusuri bagaimana hubungan antara motif-motif tersebut memengaruhi kewibawaan kepemimpinan lokal pasca-pemilihan.

Secara internasional dan regional, penelitian dari Şener et al (2023) dan Dehdari et al (2021) memberikan perspektif tambahan. Şener et al. menyoroti faktor sosiopsikologis di Medan, di mana aktivitas ekonomi menjadi alasan dominan masyarakat untuk tidak memilih (34,18%), disusul oleh ketidakpuasan akibat isu korupsi. Sementara itu, (Dehdari et al., 2021) mengkaji fenomena *selective abstention* di Swedia, yang menjelaskan mengapa individu cenderung lebih aktif dalam pemilu nasional dibandingkan pemilu lokal berdasarkan faktor demografis dan status sosial ekonomi.

kelima penelitian tersebut memberikan landasan yang kuat mengenai faktor-faktor penyebab rendahnya partisipasi politik dari berbagai sudut pandang. Namun, penelitian ini hadir untuk mengisi ruang kosong yang belum dibahas secara mendalam, yaitu bagaimana akumulasi dari faktor-faktor penyebab golput tersebut berimplikasi secara nyata terhadap dimensi legitimasi politik (ideologis, kinerja, partisipatif, dan kepercayaan) kepala daerah terpilih, khususnya dalam konteks unik Kota Batam sebagai kawasan industri dengan karakteristik masyarakat yang sangat dinamis.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan ilmiah dalam penelitian ini terletak pada fokus analisisnya yang tidak hanya membedah penyebab golput, tetapi mengintegrasikannya dengan empat dimensi legitimasi politik, yaitu dimensi ideologis, kinerja, partisipatif, dan kepercayaan. Berbeda dengan studi sebelumnya, penelitian ini secara spesifik menempatkan konteks pada masyarakat industri Kota Batam yang memiliki mobilitas penduduk tinggi, serta menggunakan teknik analisis data berbantuan perangkat lunak NVivo 12 untuk menemukan pola hubungan yang lebih presisi antara partisipasi masyarakat dan kualitas kepemimpinan lokal.

1.6 Tujuan

Secara sistematis, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor struktural maupun kultural yang menyebabkan melonjaknya angka golput pada Pilkada Kota Batam tahun 2024. Selain itu, studi ini bermaksud untuk mengkaji secara mendalam bagaimana implikasi dari tingginya angka golput tersebut memengaruhi legitimasi politik kepala daerah terpilih dalam menjalankan roda pemerintahan. Terakhir, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi fenomena golput guna meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi masyarakat di masa mendatang

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji fenomena tingginya angka golput dan dampaknya terhadap legitimasi politik di Kota Batam. Fokus utama dari metode ini adalah untuk memahami realitas subjektif dan fenomena secara menyeluruh melalui deskripsi mendalam dalam bentuk kata-kata dan narasi, bukan angka-angka statistik. Desain penelitian deskriptif dipilih agar peneliti dapat menjelaskan secara kronologis dan sistematis fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, sehingga mampu memberikan pemahaman yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan mengenai implikasi rendahnya partisipasi pemilih terhadap kewibawaan kepala daerah terpilih.

Untuk mendapatkan data yang akurat, peneliti menerapkan teknik triangulasi yang menggabungkan tiga metode pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam, dokumentasi, dan kuesioner terbuka. Sumber data primer diperoleh dari 25 informan yang ditentukan melalui teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*, yang mencakup pemangku kepentingan kunci seperti Kepala Badan Kesbangpol Kota Batam, Ketua KPU Kota Batam, serta anggota masyarakat umum. Selain itu, data diperkuat dengan sumber sekunder berupa studi literatur, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi dari KPU serta Bawaslu guna memberikan konteks faktual dan teoritis yang lebih luas terhadap permasalahan yang dikaji.

Seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah melalui teknik analisis data kualitatif menggunakan *prosedur Data Analysis Procedure by Application (DAPA)* dengan bantuan perangkat lunak *NVivo 12*. Penggunaan aplikasi ini memungkinkan peneliti untuk mengorganisir data dari berbagai format secara efisien serta mengidentifikasi tema dan pola hubungan antar data melalui visualisasi seperti *word cloud.* Dalam melakukan analisis, peneliti berpedoman pada teori legitimasi politik yang mencakup empat dimensi utama, yaitu dimensi ideologis, kinerja, partisipatif, dan

kepercayaan, guna mengukur sejauh mana fenomena golput memengaruhi keabsahan kekuasaan kepala daerah terpilih.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implikasi Golput terhadap Legitimasi Politik Kepala Daerah

Tingginya angka golput pada pilkada kota batam tahun 2024 yang mencapai 53,24 % memberikan implikasi yang signifikan terhadap legitimasi politik kepala daerah terpilih. Berpedoman pada teori legitimasi politik, implikasi tersebut dianalisis melalui empat dimensi utama, yaitu dimensi ideologis, kinerja, partisipatif, dan kepercayaan, sebagaimana diuraikan paa bagian berikut.

3.1.1 Dimensi Ideologis

Implikasi pertama dilihat dari kesesuaian nilai antara pemimpin dan rakyat. Jika angka golput tinggi, hal ini menandakan adanya keretakan ideologis di mana visi dan moralitas yang ditawarkan kandidat tidak mampu menyentuh keyakinan dasar masyarakat.

Gambar 1.

Wordcloud Dimensi Ideologis



Sumber : diolah oleh peneliti menggunakan *NVivo 12* (2026)

Berdasarkan analisis pada Gambar 1, terlihat bahwa kata kunci “politik” menjadi kata yang paling dominan, kemudian diikuti oleh kata “masyarakat”, “kesadaran”, “partisipasi”, dan “demokrasi”. Dominasi kata-kata tersebut menunjukkan bahwa fenomena golput di Kota Batam tidak hanya berkaitan dengan faktor teknis maupun ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan tingkat pemahaman dan kesadaran politik masyarakat terhadap pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi lokal. Kemunculan kata “kesadaran” dan “demokrasi” yang cukup menonjol mengindikasikan bahwa

partisipasi politik masyarakat sangat dipengaruhi oleh sejauh mana individu memahami hak dan tanggung jawab politiknya sebagai warga negara.

3.1.2 Dimensi Kinerja (*Performance Legitimacy*)

Legitimasi kinerja berkaitan dengan sejauh mana pemerintah mampu membuktikan keberhasilannya dalam memenuhi kebutuhan publik pasca-terpilih. Golput yang tinggi memberikan beban tambahan bagi pemimpin untuk menunjukkan kinerja ekstra guna mendapatkan pengakuan sosiologis dari mayoritas warga yang sebelumnya abstain.

Gambar 2.
Wordcloud Dimensi Kinerja



Sumber : diolah oleh peneliti menggunakan *NVivo 12* (2026)

Visualisasi pada Gambar 2 menonjolkan kata “kebijakan” dan “stabilitas”. Penjelasan gambarnya adalah bahwa legitimasi pemimpin sangat bergantung pada efektivitas kebijakan yang dihasilkan; jika kebijakan mampu menjawab kebutuhan publik secara nyata, maka stabilitas pemerintahan akan tetap terjaga meskipun partisipasi awal rendah.

3.1.3 Dimensi Partisipatif

Dimensi ini mengukur seberapa luas akses dan keterlibatan masyarakat dalam ruang pengambilan keputusan. Ketika lebih dari separuh warga (53,24%) memilih golput, maka representasi suara rakyat dalam pemerintahan menjadi tidak optimal.

Gambar 3.

Wordcloud Dimensi Partisipatif



Sumber : diolah oleh peneliti menggunakan *NVivo 12* (2026)

Gambar 3 menonjolkan kata "partisipasi", "publik", dan "kebijakan". Narasi penjelasannya adalah bahwa keabsahan kekuasaan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif; jika partisipasi rendah, pemerintah harus bekerja keras membuka ruang dialog publik agar kebijakan yang diambil tetap mendapatkan dukungan sosiologis.

3.1.4 Dimensi Kepercayaan *(Trust Legitimacy)*

Implikasi terakhir adalah pada tingkat kepercayaan terhadap integritas pemimpin. Kepala daerah yang terpilih dengan partisipasi rendah menghadapi tantangan besar dalam membangun kembali kepercayaan publik yang telah terkikis.

Gambar 4.

Wordcloud Dimensi Kepercayaan



Sumber : diolah oleh peneliti menggunakan *NVivo 12* (2026)

Hasil analisis Gambar 4 menunjukkan dominasi kata “kepercayaan”, “aspirasi”, dan “publik”. Penjelasan dari gambar ini adalah bahwa legitimasi sosiologis hanya dapat pulih jika pemerintah mampu merespon aspirasi masyarakat dengan transparan dan jujur, guna meminimalkan rasa ketidakpuasan yang sebelumnya memicu perilaku golput.

3.2 Upaya Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Tingginya Angka Golput pada Pilkada Kota Batam

Upaya pemerintah daerah dalam memitigasi fenomena golput merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pemahaman politik warga. Pemerintah Kota Batam, melalui kolaborasi antar-lembaga seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), KPU, dan Bawaslu, telah merumuskan berbagai strategi yang mencakup sosialisasi, pembinaan komunitas, hingga pemanfaatan media informasi. Berdasarkan data penelitian, upaya ini difokuskan agar masyarakat tidak hanya sekadar datang ke TPS, tetapi juga memiliki kesadaran kritis dalam menggunakan hak pilihnya.

3.2.1 Sosialisasi dan Pendidikan Politik

Langkah utama yang dijalankan adalah melalui program sosialisasi dan pendidikan politik yang bersifat terintegrasi. Pemerintah daerah, dalam hal ini Kesbangpol, bertindak sebagai fasilitator dan koordinator untuk meningkatkan literasi demokrasi bagi berbagai kelompok sasaran, seperti pemilih pemula, organisasi perempuan, dan komunitas kepemudaan. Kegiatan ini biasanya diwujudkan dalam bentuk forum diskusi kebangsaan dan dialog publik guna memberikan pemahaman mengenai urgensi satu suara bagi masa depan daerah. Namun, hasil penelitian mencatat bahwa kegiatan ini sering kali masih bersifat momentum atau hanya gencar dilaksanakan menjelang hari pemilihan, sehingga diperlukan transformasi menjadi pendidikan politik yang berkelanjutan sepanjang tahun agar dampaknya lebih menetap dalam kesadaran warga.

3.2.2 Pembinaan Organisasi dan Komunitas

Selain sosialisasi langsung, pemerintah daerah juga melakukan pembinaan intensif terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) dan organisasi kepemudaan sebagai mitra strategis di tingkat akar rumput. Organisasi-organisasi ini dianggap memiliki kedekatan emosional dan akses langsung kepada warga di berbagai lapisan sosial, sehingga efektif dalam memperluas jangkauan informasi politik. Sinergi ini diperkuat melalui rapat koordinasi rutin dan pertukaran data antara pemerintah daerah dengan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) untuk memastikan stabilitas politik tetap terjaga selama tahapan Pilkada berlangsung.

3.2.3 Pemanfaatan Media dan Kampanye Informasi

Strategi berikutnya melibatkan pemanfaatan berbagai kanal media untuk menyebarkan informasi mengenai tahapan dan pentingnya Pilkada. KPU Kota Batam menerapkan strategi segmentasi pemilih dengan menyasar lembaga pendidikan, media massa, hingga sektor swasta. Kampanye informasi dilakukan melalui media cetak, radio, pemasangan spanduk, mading, hingga baliho di titik-titik strategis kota. Walaupun kanal informasi yang digunakan sudah cukup beragam, penelitian menemukan bahwa penyebaran informasi ini belum sepenuhnya merata dan belum cukup optimal dalam menarik minat masyarakat secara masif, sehingga muncul rekomendasi untuk lebih mengoptimalkan media digital dan media sosial agar lebih relevan dengan gaya hidup masyarakat modern.

3.2.4 Strategi Pendekatan pada Pemilih

Pendekatan khusus juga dilakukan secara langsung kepada kelompok-kelompok yang dinilai rentan terhadap sikap apatis, seperti pemilih pemula di sekolah dan universitas. Edukasi politik dilakukan dengan mendatangi institusi pendidikan untuk memberikan pemahaman teknis maupun substansial mengenai hak pilih. Selain itu, pemerintah daerah melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda sebagai agen penyampai pesan atau *influencer* lokal. Pendekatan melalui tokoh-tokoh ini dinilai lebih efektif dalam membangun kepercayaan warga dan mendorong partisipasi aktif karena adanya ikatan sosial yang kuat di lingkungan masyarakat terkecil.

3.2.5 Evaluasi dan Penguatan Strategi Berkelanjutan

Secara keseluruhan, meskipun berbagai upaya telah dijalankan, efektivitasnya dalam menekan angka golput pada Pilkada 2024 dinilai belum maksimal. Berbagai kendala struktural seperti tingginya mobilitas penduduk, karakteristik Batam sebagai kawasan industri dengan jam kerja padat, serta faktor eksternal seperti cuaca hujan yang ekstrem saat hari pemungutan suara tetap menjadi penghambat utama partisipasi. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan strategi yang lebih inovatif, seperti penggunaan aplikasi digital yang lebih interaktif, sinkronisasi jam kerja industri dengan jadwal pemilihan, serta pelaksanaan pendidikan politik yang tidak hanya bersifat seremonial namun berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implikasi golput terhadap legitimasi politik kepala daerah di Kota Batam, ditemukan bahwa angka golput yang mencapai 53,24% pada Pilkada 2024 bukan sekadar fenomena teknis administratif, melainkan sebuah sinyal krisis kepercayaan yang mendalam. Temuan ini memperkuat sekaligus memberikan pembeda terhadap beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam studi ini.

Analisis faktor penyebab golput di Kota Batam menunjukkan adanya kesamaan fundamental dengan temuan Fadel Al Rizki et al. (2025) dan Mustaqim & Rambang Basari (2024) terkait aspek rendahnya kepercayaan publik. Sebagaimana di Jakarta dan Kabupaten Bogor, pemilih di Batam cenderung menarik diri dari proses pemilihan karena adanya *trust deficit* terhadap elit politik yang dianggap gagal merealisasikan janji-janji kampanye. Namun, penelitian ini menemukan bahwa di Batam, faktor kepercayaan ini berkelindan erat dengan karakteristik masyarakat industri. Jika Şener et al. (2023) dalam studinya di Medan menemukan bahwa aktivitas ekonomi menjadi alasan dominan (34,18%) masyarakat tidak memilih, hasil penelitian ini mengonfirmasi pola serupa namun dengan konteks yang lebih spesifik pada jam kerja sektor industri yang padat. Di Batam, hambatan ekonomi bukan hanya soal kesibukan personal, melainkan sistem kerja pabrik yang tidak fleksibel, yang pada akhirnya memicu perilaku abstain.

Lebih lanjut, temuan mengenai tingginya mobilitas penduduk dan kendala administratif di Batam memiliki relevansi dengan konsep *selective abstention* yang dikaji oleh Dehdari et al. (2021) di Swedia. Meskipun lokusnya berbeda, prinsip dasarnya serupa: pemilih cenderung abstain dalam pemilihan lokal karena hambatan administratif, seperti mahasiswa Batam yang belajar di luar daerah dan tidak dapat melakukan pindah memilih karena regulasi Pilkada yang mengharuskan pemungutan suara di kota asal. Hal ini membuktikan bahwa faktor demografis dan mobilitas merupakan variabel global yang konsisten memengaruhi partisipasi politik di tingkat daerah.

Poin pembeda utama (*novelty*) dari penelitian ini dibandingkan dengan seluruh penelitian terdahulu adalah pada analisis implikasinya terhadap legitimasi politik. Jika penelitian Pratiwi (2024) berhenti pada analisis faktor penyebab melalui teori pilihan rasional, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan membuktikan bahwa akumulasi dari faktor-faktor tersebut secara sosiologis melemahkan empat dimensi legitimasi kepala daerah: ideologis, kinerja, partisipatif, dan kepercayaan. Hasil diskusi menunjukkan bahwa meskipun kepala daerah terpilih memiliki legitimasi formal-legal yang sah menurut undang-undang, mereka menghadapi tantangan *legitimacy gap* secara sosiologis karena didukung oleh kurang dari separuh populasi pemilih.

Secara keseluruhan, diskusi ini menyimpulkan bahwa fenomena golput di Kota Batam merupakan bentuk "protes bisu" yang lebih kompleks dibandingkan wilayah lain karena adanya irisan antara krisis kepercayaan politik dengan dengan kendala struktural masyarakat industri. Temuan ini menegaskan bahwa untuk memperkuat

legitimasi kepemimpinan di daerah seperti Batam, pemerintah tidak hanya perlu memperbaiki aspek teknis pemilu, tetapi juga harus memulihkan integritas relasional antara penguasa dan rakyat melalui kinerja nyata yang transparan guna menjawab tantangan apatisme yang telah menjadi tren dalam satu dekade terakhir.

3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain implikasinya terhadap empat dimensi legitimasi politik, penelitian ini juga mengungkap berbagai temuan menarik yang bersifat situasional dan kontekstual mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi tingginya angka golput pada Pilkada Kota Batam Tahun 2024. Temuan-temuan ini memperkaya pemahaman mengenai akar persoalan golput di luar kerangka utama dimensi legitimasi, sekaligus menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan partisipasi politik ke depan.

3.4.1 Rendahnya Kepercayaan terhadap Pemerintah dan Elit Politik

Salah satu temuan yang paling menonjol adalah krisis kepercayaan (trust deficit) masyarakat terhadap pemerintah dan aktor politik. Masyarakat cenderung bersikap apatis ketika merasa bahwa aspirasi mereka tidak pernah benar-benar diakomodasi dalam proses pengambilan kebijakan. Temuan ini diperkuat oleh hasil kuesioner di mana responden merasa janji politik sering kali tidak terealisasi, sehingga muncul anggapan bahwa siapa pun yang terpilih tidak akan membawa perubahan nyata bagi kehidupan mereka.

Gambar 5.

Wordcloud Faktor Rendahnya Kepercayaan Terhadap Pemerintah dan Elit Politik



Sumber: diolah oleh peneliti menggunakan *NVivo 12* (2026)

Visualisasi pada Gambar 5 menunjukkan dominasi kata “politik”, “kepercayaan”, “elit”, dan “pemerintah” sebagai isu sentral yang muncul dari data wawancara. Ukuran kata “kepercayaan” yang menonjol mengonfirmasi bahwa aspek trust adalah kunci penentu partisipasi; ketika persepsi terhadap integritas elit memburuk, kecenderungan publik untuk menarik diri dari proses demokrasi (golput) akan semakin besar. Kondisi krisis kepercayaan ini pada akhirnya turut melemahkan dimensi legitimasi kepercayaan (trust legitimacy) yang dibahas pada bagian sebelumnya, di mana integritas dan moralitas pemimpin politik mulai diragukan secara mendalam oleh publik.

3.4.2 Minimnya Ketertarikan terhadap Kandidat Kepala Daerah

Temuan menarik berikutnya berkaitan dengan daya tarik pasangan calon (paslon) yang bertarung. Rendahnya minat pemilih sering kali disebabkan oleh profil kandidat yang dianggap kurang meyakinkan, tidak memiliki rekam jejak yang kuat, atau visinya tidak selaras dengan kebutuhan mendesak masyarakat Batam. Selain kualitas, jumlah pasangan calon juga berpengaruh; semakin sedikit pilihan yang tersedia, semakin rendah pula antusiasme masyarakat untuk datang ke TPS, sehingga memicu sikap apatis pemilih yang merasa partisipasi mereka tidak akan membawa perubahan signifikan bagi masa depan daerah.

Gambar 6.

Wordcloud Faktor Minimnya Ketertarikan terhadap Kandidat Kepala Daerah



Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan *NVivo 12* (2026)

Berdasarkan analisis pada Gambar 6, kata “kandidat” muncul sebagai pusat perhatian, diikuti oleh kata “minimnya” dan “ketertarikan”. Hal ini menjelaskan bahwa ketidakhadiran pemilih di TPS merupakan respon langsung terhadap kurangnya figur yang mampu membangkitkan harapan publik. Pola ini menegaskan bahwa keberagaman dan kualitas kompetisi antar-paslon sangat krusial dalam menekan angka golput.

3.4.3 Kesibukan Kerja dan Karakteristik Masyarakat Industri

Sebagai kota industri, karakteristik sosiopolitik Batam sangat dipengaruhi oleh ritme kerja penduduknya. Fokus utama masyarakat sering kali tersedot pada aktivitas ekonomi praktis daripada politik.

Gambar 7.

Wordcloud Faktor Kesibukan Kerja dan Karakteristik Masyarakat Industri



Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan *NVivo 12* (2026)

Narasi visual pada Gambar 7 menunjukkan bahwa kata "kerja" menjadi isu yang paling dominan dalam persepsi masyarakat terkait alasan tidak menggunakan hak pilih pada Pilkada Kota Batam Tahun 2024. Dominasi kata tersebut kemudian diikuti oleh kata "kesibukan" dan "ekonomi", yang mengindikasikan bahwa keputusan masyarakat untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan tidak selalu didasarkan pada faktor politik, ideologis, maupun ketidakpercayaan terhadap sistem demokrasi. Sebaliknya, sebagian besar responden menghadapi kendala yang bersifat praktis dan berkaitan dengan tuntutan kehidupan sehari-hari. Tingginya aktivitas kerja, padatnya jadwal pekerjaan, serta kebutuhan untuk mempertahankan stabilitas ekonomi keluarga membuat sebagian masyarakat menempatkan kegiatan politik elektoral sebagai prioritas yang lebih rendah dibandingkan dengan aktivitas ekonomi yang dianggap lebih mendesak.

Temuan ini diperkuat oleh adanya kalkulasi ekonomi masyarakat industri yang bersifat sangat transaksional dan rasional. Di tengah karakteristik Batam sebagai kawasan perdagangan bebas, masyarakat pekerja cenderung membandingkan nilai ekonomis antara waktu yang dihabiskan untuk mengantre di TPS dengan potensi penghasilan yang hilang dari jam lembur atau aktivitas ekonomi lainnya. Sikap individualis dan egosentris ini muncul karena adanya pandangan bahwa siapa pun yang terpilih tidak akan memberikan dampak instan terhadap kesejahteraan ekonomi harian mereka. Temuan ini mengindikasikan bahwa di kota industri, tantangan legitimasi bukan hanya soal ideologi, tetapi juga soal bagaimana proses demokrasi dapat mengakomodasi ritme hidup

masyarakat pekerja yang sangat mengutamakan nilai-nilai ekonomi praktis di atas partisipasi politik formal.

3.4.4 Tingginya Mobilitas Penduduk

Mobilitas penduduk yang dinamis di Batam menjadi tantangan administratif tersendiri. Banyak warga yang secara administratif terdaftar di Batam namun sedang bekerja atau menempuh pendidikan di luar daerah, seperti kelompok mahasiswa. Karena regulasi Pilkada mewajibkan pemilih untuk berada di lokasi domisili asal tanpa mekanisme pindah memilih semudah Pemilu nasional, banyak pemilih potensial yang akhirnya kehilangan hak suaranya secara teknis.

Gambar 8.

Wordcloud Faktor Tingginya Mobilitas Penduduk



Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan *NVivo 12* (2026)

Berdasarkan analisis pada gambar 8 menonjolkan kata “mobilitas”, “partisipasi”, dan “mahasiswa”. Penjelasan dari gambar ini adalah adanya korelasi negatif antara pergerakan fisik penduduk dengan angka partisipasi; semakin dinamis mobilitas warga keluar-masuk Batam, semakin tinggi risiko penurunan jumlah pemilih di TPS karena kendala administratif domisili.

Temuan ini berkaitan erat dengan adanya gap administratif bagi pemilih muda, khususnya kelompok mahasiswa asal Batam yang menempuh pendidikan di luar daerah. Berbeda dengan Pemilu nasional di mana pemilih dapat menggunakan mekanisme pindah memilih ke luar negeri maupun luar kota, regulasi Pilkada mewajibkan pemilih untuk memberikan suara hanya di daerah asal sesuai domisili KTP. Akibatnya, banyak mahasiswa Batam yang memiliki hak pilih secara sah terpaksa menjadi “golput teknis” karena keterbatasan biaya dan waktu untuk pulang ke daerah asal hanya demi melakukan pencoblosan. Temuan ini menegaskan bahwa mobilitas penduduk yang tinggi untuk

tujuan pendidikan merupakan variabel krusial yang menyumbang angka golput di kota dinamis seperti Kota Batam.

3.4.5 Faktor Cuaca (Kondisi Alam)

Kondisi alam yang tidak terduga pada hari pemungutan suara Pilkada 2024 turut berkontribusi menurunkan kehadiran pemilih. Curah hujan yang sangat tinggi di wilayah Batam memaksa masyarakat untuk tetap berada di rumah, terutama bagi mereka yang memiliki akses transportasi terbatas atau lokasi TPS yang sulit dijangkau saat hujan deras.

Gambar 9.

Wordcloud Faktor Cuaca (Kondisi Alam)



Sumber: diolah oleh peneliti menggunakan *NVivo 12* (2026)

Dominasi kata “cuaca” dan “hujan” pada Gambar 9 menunjukkan bahwa faktor eksternal ini diakui secara eksplisit oleh responden sebagai penyebab rendahnya kehadiran di TPS. Berdasarkan data dari KPU Kota Batam, terdapat relasi positif yang sangat kuat antara tingginya curah hujan dengan rendahnya partisipasi pemilih, di mana Batam mencatatkan tingkat curah hujan tertinggi dibandingkan daerah lain di Kepulauan Riau pada saat itu. Hal ini menarik karena menunjukkan bahwa dalam konteks lokal, legitimasi politik seorang pemimpin dapat dipengaruhi oleh variabel non-politik seperti cuaca, yang menghambat akses fisik pemilih ke TPS dan secara otomatis meningkatkan angka golput secara teknis. Temuan ini mengonfirmasi bahwa kendala fisik akibat alam merupakan variabel yang tidak dapat diabaikan dalam mengevaluasi fluktuasi angka partisipasi di daerah bercurah hujan tinggi seperti Kota Batam.

3.4.6 Kurangnya Pendidikan dan Kesadaran Politik

Faktor terakhir adalah masih rendahnya literasi politik masyarakat mengenai urgensi Pilkada bagi masa depan daerah. Tanpa pemahaman yang memadai tentang bagaimana satu suara memengaruhi kebijakan publik, masyarakat cenderung memandang

pemilu sebagai rutinitas administratif belaka yang tidak memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan mereka. Kondisi ini diperparah oleh pola edukasi politik yang belum merata dan berkelanjutan, sehingga masyarakat belum sepenuhnya menyadari bahwa hak pilih mereka adalah fondasi utama dalam menjaga kedaulatan rakyat Oleh karena itu, penguatan literasi melalui pendidikan politik sepanjang tahun menjadi sangat krusial untuk mengubah sikap apatis menjadi partisipasi aktif guna memperkuat legitimasi politik kepala daerah. Tanpa pemahaman kognitif yang kuat, masyarakat akan kehilangan kesempatan strategis untuk menentukan arah kebijakan pembangunan dan kualitas kepemimpinan di Kota Batam secara nyata.

Gambar 10.

Wordcloud Faktor Kurangnya Pendidikan dan Kesadaran Politik



Sumber: diolah oleh peneliti menggunakan *NVivo 1*2 (2026)

Penjelasan dari Gambar 10 yang menonjolkan kata “kurangnya”, “kesadaran”, dan “pendidikan” adalah adanya kebutuhan mendesak akan penguatan literasi politik. Gambar ini merepresentasikan bahwa golput di Batam berakar pada masalah kognitif, di mana sikap apatis tumbuh subur akibat minimnya edukasi politik yang berkelanjutan dari berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, penguatan literasi melalui pendidikan politik sepanjang tahun menjadi sangat krusial untuk mengubah sikap apatis menjadi partisipasi aktif guna memperkuat legitimasi politik kepala daerah.

3.4.7 Kejenuhan Politik

Temuan menarik lainnya adalah munculnya fenomena kejenuhan politik (political fatigue) di kalangan masyarakat Batam. Kedekatan jarak waktu antara pelaksanaan Pemilu Serentak (Pilpres dan Pileg) dengan Pilkada 2024 yang hanya terpaut beberapa bulan dinilai telah menguras energi dan antusiasme warga. Masyarakat cenderung merasa jenuh dengan hiruk-pikuk kampanye yang berkelanjutan, sehingga pada pemilihan tingkat daerah, semangat untuk berpartisipasi menurun drastis dibandingkan saat

pemilihan nasional. Kejenuhan ini diperparah oleh putusan Mahkamah Konstitusi terkait jadwal pemilu yang berdekatan, yang menurut penyelenggara pemilu di Batam, menjadi salah satu faktor psikologis di balik angka golput yang mencapai lebih dari 50%.

Secara keseluruhan, ketujuh temuan menarik ini menunjukkan bahwa golput di Kota Batam tidak dapat dipahami secara tunggal, melainkan merupakan akumulasi dari faktor kepercayaan, daya tarik kandidat, karakteristik masyarakat industri, mobilitas penduduk, kondisi alam, literasi politik, dan kejenuhan politik yang saling berkelindan, sekaligus memperkuat temuan utama bahwa fenomena ini secara nyata melemahkan empat dimensi legiimasi politik kepala daerah terpilih.

IV. KESIMPULAN

Tingginya angka golput pada Pilkada Kota Batam Tahun 2024 yang mencapai 53,24% merupakan sebuah fenomena kompleks yang dipicu oleh akumulasi berbagai faktor struktural dan kultural, mulai dari tingginya mobilitas penduduk, rendahnya kesadaran politik, hingga krisis kepercayaan terhadap kandidat dan elit politik. Karakteristik Batam sebagai kota industri dengan dominasi pekerja yang memiliki keterbatasan waktu, ditambah dengan faktor eksternal seperti cuaca hujan ekstrem dan kejenuhan politik, semakin memperkuat kecenderungan masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Fenomena ini membawa implikasi serius dalam melemahkan legitimasi politik kepala daerah terpilih secara sosiologis, di mana rendahnya partisipasi mencerminkan lemahnya dimensi ideologis, kinerja, partisipatif, serta kepercayaan publik, meskipun secara formal-legal hasil pemilihan tetap dianggap sah menurut regulasi. Kondisi tersebut menegaskan bahwa permasalahan partisipasi bukan sekadar persoalan teknis pemilu, melainkan cerminan dari persoalan mendasar dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang belum harmonis. Meskipun pemerintah daerah melalui Kesbangpol dan penyelenggara pemilu telah berupaya melakukan berbagai strategi sosialisasi dan pendidikan politik, langkah-langkah tersebut dinilai belum optimal karena pelaksanaannya yang kurang berkelanjutan serta belum sepenuhnya mampu menyesuaikan dengan karakteristik masyarakat Batam yang sangat dinamis.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah informan yang hanya mencakup 25 orang, sehingga generalisasi temuan untuk seluruh populasi Kota Batam yang heterogen bersifat terbatas. Secara teknis, peneliti menghadapi hambatan akses langsung ke pekerja di sektor industri akibat regulasi kawasan pabrik yang ketat dan jadwal kerja yang padat. Selain itu, fokus penelitian yang hanya terbatas pada lokus Kota Batam menyebabkan hasil temuan tidak dapat digeneralisasi secara luas

pada wilayah dengan karakteristik sosiopolitik yang berbeda.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan melalui studi komparatif antar kota industri guna melihat pola perilaku pemilih secara lebih universal. Penggunaan metode campuran (*mixed-methods*) sangat disarankan untuk mengukur korelasi variabel eksternal, seperti cuaca dan jam kerja, terhadap angka partisipasi secara lebih presisi. Selain itu, perlu dilakukan eksperimen terkait strategi kampanye digital yang interaktif bagi pemilih muda serta studi longitudinal untuk memantau dampak rendahnya partisipasi terhadap stabilitas pemerintahan jangka panjang.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua, Bapak Effendi dan Ibu Marni, serta seluruh keluarga besar atas doa, kasih sayang, dan dukungan moril maupun materil yang luar biasa.

Apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Ibu Astika Ummy Athahirah, S.STP, M.Si selaku dosen pembimbing, serta segenap pimpinan dan dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri atas bimbingan, ilmu, dan arahan yang diberikan. Penulis juga berterima kasih kepada jajaran Badan Kesbangpol Kota Batam dan KPU Kota Batam yang telah bersedia memberikan data serta informasi krusial bagi keberhasilan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Dehdari, S., Meriläinen, J., & Oskarsson, S. (2021). *Selective abstention* in simultaneous elections: Understanding the turnout gap. *Electoral Studies*, *71*(October 2020), 1–5. https://doi.org/10.1016/j.electstud.2021.102302

Edward Aspinall, Sally White, and A. S. (2021). *Women ' s Political Representation in Indonesia : Who Wins and How ?* https://doi.org/10.1177/1868103421989720

Fadel Al Rizki, M., Pebriani Wahyu, F., Muslim, J., & Sunan Gunung Djati Bandung, U. (2025). *Analysis of the Causes of Golput (White Group) in the 2024 Regional Elections in DKI Jakarta*. *1*, 71–76.

Labolo, M. (2007). *MENIMBANG KEMBALI ALTERNATIF MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA Muhadam Labolo 1*. *VIII*(12), 1–15. https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/79

Mustaqim, & Rambang Basari. (2024). Motif Masyarakat Kabupaten Bogor Memilih Golput Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 Dalam Perspektif Analisis

Interaksionisme Simbolik. *Communication Lens*, *4*(2), 1–24.

Nasir, M. (2026). *Understanding voter behavior in direct local elections : a case study from the Southeast Sulawesi Islands , Indonesia*. *April*. https://doi.org/10.3389/fpos.2026.1754738

Pratiwi. (2024). Analisis Fenomena Golongan Putih Pada Pemilihan Kepala Daerah 2024. *Journal Politics and Government*, *1*(2), 140–147. https://doi.org/10.46306/jpg.v1i2.90

Sari, N. M. W. K. A. ; A. G. P. (2023). *Peningkatan, Strategi Pemilih, Partisipasi Kepala, Pemilihan Kota, Daerah Analytical, Menggunakan Process, Hirerarchy*. *6*(1), 25–32. https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jkp.v6i1.3249

Şener, T., Balku, Y., Alkan, Y. S., Doru, S., Okudan Dernek, K., & Zenginoğlu, S. (2023). The socio-psychological factors affecting the voting behaviour of the postgraduate politics students: a Q-methodology study. *Frontiers in Psychology*, *14*(December), 1–15. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1218104

Silverius, P. :, Seran, T., Risyah, V., Pemerintahan, I., Negeri, D., & Kalimantan Barat, K. (2024). Politik Dinasti Dalam Perspektif Administrasi (Studi Isu Politik Dinasti Menjelang Pemilihan Umum 2024) conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License-(CC-BY-SA). *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, *4*(1), 1–16. https://doi.org/10.33701/jtpm.v4i1.3792


INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
1956
KEMENTERIAN DALAM NEGERI